



**TAHUN 2021**



# **RENCANA KERJA PERUBAHAN**

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN  
LAMONGAN**



## **KATA PENGANTAR**

Rencana Kerja Perubahan (RENJA PERUBAHAN) merupakan dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memuat Kebijakan dan Program/ Kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Satuan Kerja Perangkat Daerah. Disamping itu RENJA berfungsi untuk mereview hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun sebelumnya dan perkiraan capaian tahun beijakan dan tahun berikutnya.

Rencana Kerja Perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayaran Terpadu Satu Pintu (RENJA DPMPTSP) Kabupaten Lamongan Tahun 2021 merupakan dokumen perencanaan tahun terakhir dari Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016 - 2021 yang memuat rencana tujuan dan sasaran periode tersebut yang hendak dicapai sesuai tugas pokok dan fungsi DPMPTSP Kabupaten Lamongan. Program dan Kegiatan pada Renja Perubahan 2021 ini mengacu pada Program dan Kegiatan dalam Renstra DPMPTSP Kabupaten Lamongan tahun terakhir serta mengevaluasi Program dan Kegiatan yang telah berjalan pada tahun sebelumnya.

Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan 2021) disusun berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yang menggambarkan pencapaian Rencana Strategis, data indikatif Peserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif. Melalui Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan Tahun 2021 diharapkan dapat memberikan informasi tentang kejelasan dan manfaat program /kegiatan yang direncanakan bagi pemerintah dan masyarakat.

Lamongan, November 2021  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN LAOMONGAN

**AGUS CAHYONO, SE,M.Si**

Pembina Utama Muda  
NIP. 1965080 199303 1 002



## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Rencana Kerja Satuan Kerja Perubahan Perangkat Daerah (RENJA SKPD) merupakan dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk periode 1 (satu) tahun. Renja SKPD merupakan penjabaran perencanaan tahunan dari Rencana Strategis (Renstra) SKPD sehingga penyusunan Renja SKPD berpedoman pada Renstra SKPD dan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan, yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah.

Sebagai dokumen rencana tahunan, RENJA Perubahan DPMPTSP Kabupaten Lamongan mempunyai arti strategis dalam penyelenggaraan program pembangunan tahunan Pemerintah Kabupaten Lamongan, mengingat beberapa hal sebagai berikut:

1. RENJA Perubahan SKPD merupakan dokumen yang secara substansial menjabarkan visi, misi, dan program SKPD seperti yang ditetapkan dalam Rencana Strategis SKPD dan sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD);
2. RENJA Perubahan SKPD merupakan acuan bagi SKPD untuk memasukkan program dan kegiatan ke dalam KUA–PPAS dan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) pada tahun 2021;
3. RENJA Perubahan SKPD merupakan salah satu instrumen evaluasi pelaksanaan program/kegiatan SKPD untuk mengetahui capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) sebagai wujud dari kinerja SKPD.



## 1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan RENJA Perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Kabupaten Lamongan Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);



9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tata Cara Evaluasi RRPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD Dan RKPD;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lamongan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2012 Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 8);
12. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 – 2021;
13. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 81 Tahun 2020 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi serta tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan;

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

#### **1.3.1 Maksud**

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Kabupaten Lamongan Tahun 2021 dimaksudkan sebagai panduan dalam melakukan evaluasi pelaksanaan program/ kegiatan Tahun 2020 dan perencanaan program/ kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan Tahun 2021.

#### **1.3.2 Tujuan**

Sedangkan tujuan disusunnya Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan



Tahun 2021 ini adalah untuk menjadi acuan dalam penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2021.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah maka sistematika penyusunan RENJA Perubahan DPMPTSP Kabupaten Lamongan Tahun 2021 meliputi:

##### **BAB I            PENDAHULUAN**

Bab ini memuat :

- 1.1    Latar Belakang**
- 1.2    Landasan Hukum**
- 1.3    Maksud dan Tujuan**
- 1.4    Sistematika Penulisan**

##### **BAB II HASIL EVALUASI DPMPTSP KABUPATEN LAMONGAN TAHUN LALU (TAHUN 2020)**

Bab ini memuat :

- 2.1    Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja DPMPTSP Kabupaten Lamongan Tahun 2020 dan Capaian Renstra DPMPTSP Kabupaten Lamongan Tahun 2020**
- 2.2    Analisis Kinerja Pelayanan DPMPTSP Kabupaten Lamongan**
- 2.3    Isu–Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DPMPTSP Kabupaten Lamongan**
- 2.4    Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD**
- 2.5    Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**



**BAB III TUJUAN DAN SASARAN DPMPTSP KABUPATEN LAMONGAN**

Bab ini memuat :

- 3.1** Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan provinsi
- 3.2** Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja DPMPTSP Kabupaten Lamongan tahun 2021
- 3.3** Program dan kegiatan DPMPTSP Kabupaten Lamongan tahun 2021

**BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DPMPTSP KABUPATEN  
LAMONGAN**

**BAB V PENUTUP**

Bab ini memuat :

- a.** Catatan Penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- b.** Kaidah – kaidah Pelaksanaan
- c.** Rencana Tindak Lanjut



## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI DPMPTSP KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2020**

#### **2.1 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja DPMPTSP Kabupaten Lamongan Tahun 2020 dan Capaian Renstra DPMPTSP Kabupaten Lamongan.**

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan Tahun 2020 dan perkiraan capaian tahun 2021 sebagaimana Tabel T-C.29





**Tabel T-C.29**  
**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan**  
**Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020**

Nomor						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2016-2021	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja program dan keluaran kegiatan skpd tahun 2019			Target program/k egiatan renja SKPD tahun 2020	Perkiraan Realisasi capaian target program/kegiatan Renstra SKPD s/d tahun 2020 (tahun berjalan/n-1)	
										Target	Realisasi	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1						Wajib									
1	02					Penanaman Modal Daerah									
1	02	12	00	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase Unit Kerja Internal yang terlayani dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1	02	12	00	01	01	Penyediaan Jasa Perkantoran									
							Jumlah pegawai honorer/tidak tetap	9 orang	9 orang	9 orang	9 orang	100%	10 orang	10 orang	100%



**RENJA PERUBAHAN RANCANGAN **ACHIR** DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PTSP**

							Jumlah surat yg terkirim, benda pos dan materai yg tersedia	Materai @6.000,545 40 pcs, @3.000, 290 pcs benda pos lainnya 200 kali	Materai @6.000,545 40 pcs, @3.000, 290 pcs benda pos lainnya 200 kali	Materai @6.000,54 540 pcs, @3.000, 290 pcs benda pos lainnya 200 kali	Materai @6.000,545 40 pcs, @3.000, 290 pcs benda pos lainnya 200 kali	100%	Materai @6.000,426 pcs, @3.000, 268 pcs benda pos lainnya 200 kali	Materai @6.000,426 pcs, @3.000, 268 pcs benda pos lainnya 200 kali	100%
							Jumlah Rekening yang terbayar	3 rekening	3 rekening	3 rekening	3 rekening	100%	4 rekening	4 rekening	100%
							Jumlah tenaga kebersihan, pengamanan dan pengemudi	7 orang	7 orang	7 orang	7 orang	100%	7 orang	7 orang	100%
							Jumlah peserta jaminan kesehatan	3 orang	3 orang	3 orang	3 orang	100%	8 orang	8 orang	100%
							Jumlah Surat kendaraan yg terbayar	5 unit	5 unit	5 unit	5 unit	100%	6 unit	6 unit	100%
<b>1</b>	<b>02</b>	<b>12</b>	<b>00</b>	<b>01</b>	<b>02</b>	<b>Penyediaan Barang Pakai Habis Perkantoran</b>	<b>Prosentase Unit Kerja Internal yang terlayani dengan baik</b>					<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
							<b>Jumlah ATK</b>	69 jenis	69 jenis	69 jenis	69 jenis	100%	69 jenis	69 jenis	100%
							Jumlah alat listrik dan elektronik	21 jenis	21 jenis	21 jenis	21 jenis	100%	21 jenis	21 jenis	100%
							Jumlah alat pembersih	20 jenis	20 jenis	20 jenis	20 jenis	100%	20 jenis	20 jenis	100%
							Jumlah tabung pemadam	3 tabung	3 tabung	3 tabung	3 tabung	100%	1 tabung	1 tabung	100%



**RENJA PERUBAHAN RANCANGAN ACHIR DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PTSP**

							Jumlah pakai habis perlengkapan komputer	9 jenis	9 jenis	9 jenis	9 jenis	100%	9 jenis	9 jenis	100%
							Jumlah dokumentasi dan dekorasi	17 jenis	17 jenis	17 jenis	17 jenis	100%	17 jenis	17 jenis	100%
							Jumlah bahan bacaan	9 jenis	9 jenis	9 jenis	9 jenis	100%	9 jenis	9 jenis	100%
							Jumlah barang cetakan dan penggandaan	3.415 jenis, 41.050 Lbr	3.415 jenis, 41.050 Lbr	3.415 jenis, 41.050 Lbr	3.415 jenis, 41.050 Lbr	100%	3.415 jenis, 41.050 Lbr	3.415 jenis, 41.050 Lbr	100%
							Jumlah Makanan dan minuman	2070 jenis	2070 jenis	2070 jenis	2070 jenis	100%	2070 jenis	1035 jenis	50%
1	02	12	00	01	03	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi	Jumlah perjalanan dinas dalam daerah/luar daerah	124 kali	124 kali	124 kali	124 kali	100%	124 kali	124 kali	100%
1	02	12	00	02		<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Prosentase Prasarana Aparatur dengan Kondisi Baik</b>	<b>80%</b>	<b>80%</b>	<b>80%</b>	<b>80%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
1	02	12	00	02	03	Pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor : komputer, Notebook, printer	7 unit	7 unit	7 unit	7 unit	100%	7 unit	7 unit	100%
							Jumlah pengadaan meubelair	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	100%	2 unit	2 unit	100%
1	02	12	00	02	04	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah kegiatan pemeliharaan	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	100%	2 unit	2 unit	100%
1	02	12	00	02	05	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan kantor yang dipelihara :	14 unit	14 unit	14 unit	14 unit	100%	14 unit	14 unit	100%



**RENJA PERUBAHAN RANCANGAN **ACHIR** DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PTSP**

1	02	12	00	02	06	Reabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah bangunan gedung yg direhab	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	100%	1 unit	1 unit	100%
1	02	12	00	02	07	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara	5 unit	5 unit	5 unit	5 unit	100%	5 unit	5 unit	100%
1	02	12	00	03		<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>Prosentase Meningkatnya disiplin Aparatur</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	100%	<b>100%</b>	<b>100%</b>	100%
1	02	12	00	03	02	Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta kelengkapannya	51 stel	51 stel	51 stel	51 stel	100%	51 stel	51 stel	100%
1	02	12	00	05		<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Prosentase terhadap penyelesaian tugas setelah mengikuti peningkatan kapasitas SDM aparatur</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	100%	<b>100%</b>	<b>100%</b>	100%
1	02	12	00	05	01	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah pendidikan dan pelatihan formal	12 kali	12 kali	12 kali	12 kali	100%	12 kali	12 kali	100%
1	02	12	00	05	02	Sosialisasi Peraturan perundang-undangan	Jumlah peserta sosialisasi peraturan perundang-undangan	200 orang	200 orang	200 orang	200 orang	100%	-	-	-
1	02	12	00	06		<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan</b>	<b>Prosentase dokumen perencanaan dan laporan Keuangan SKPD disusun tepat waktu</b>	<b>80%</b>	<b>80%</b>	<b>80%</b>	<b>80%</b>	100%	<b>80%</b>	<b>80%</b>	100%



**RENJA PERUBAHAN RANCANGAN **ACHIR** DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PTSP**

1	02	12	00	06	01	Penyusunan laporan keuangan secara berkala	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja semesteran dan akhir tahun	3 laporan	3 laporan	3 laporan	3 laporan	100%	3 laporan	3 laporan	100%
1	02	12	00	06	02	Penyusunan Dokumen Perencanaan Dan Evaluasi	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	100%	4 dokumen	4 dokumen	100%
1	02	12	15			<b>Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi</b>	<b>Peningkatan Jumlah Investor</b>	<b>61%</b>	<b>61%</b>	<b>61%</b>	<b>61%</b>	100%	<b>61%</b>	<b>61%</b>	100%
1	02	12	15	09		Peningkatan kualitas SDM guna peningkatan pelayanan investasi	Jumlah Peserta kegiatan Peningkatan kualitas SDM guna peningkatan pelayanan investasi	55 orang	55 orang	55 orang	55 orang	100%	55 orang	55 orang	100%
1	02	12	15	10		Penyelenggaraan pameran investasi	Jumlah pengunjung pameran investasi	300 orang	300 orang	300 orang	300 orang	100%	200 orang	200 orang	50%
1	02	12	15	11		Pemeliharaan Baliho Pelayanan Perijinan	Jumlah baliho yg dipelihara	26 bh	26 bh	26 bh	26 bh	100%	26 bh	26 bh	100%
1	02	12	15	12		Gathering antara pemerintah dan Dunia Usaha di Kabupaten Lamongan	Jumlah peserta kegiatan Gathering antara pemerintah dan Dunia Usaha di Kabupaten Lamongan	150 orang	150 orang	150 orang	150 orang	100%	125 org	125 org	100%
1	02	12	15	13		Sosialisasi pelayanan perijinan pada organisasi perempuan	Jumlah peserta kegiatan Sosialisasi	35 orang	35 orang	35 orang	35 orang	100%	35 org	35 org	100%



**RENJA PERUBAHAN RANCANGAN **ACHIR** DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PTSP**

							pelayanan perijinan pada organisasi perempuan								
1	02	12	15	14		penyusunan buku profil investasi kabupaten lamongan	Jumlah penyusunan buku profil investasi kabupaten lamongan	90 buku	90 buku	90 buku	90 buku	100%	70 buku	70 buku	100%
1	02	12	15	15		Pengembangan System Informasi Penanaman Modal	Jumlah kegiatan Pengembangan System Informasi Penanaman Modal	132 kp cidi	132 kp cidi	132 kp cidi	132 kp cidi	100%	132 kp CD	132 kp CD	100%
1	02	12	16			<b>Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi</b>	<b>Prosentase Jumlah Investasi</b>	<b>61%</b>	<b>61%</b>	<b>61%</b>	<b>61%</b>	100%	<b>61%</b>	<b>61%</b>	100%
1	02	12	16	13		Penyusunan Database Investasi di Kab.Lamongan	Jumlah Penyusunan Database Investasi di Kab.Lamongan	1 item	1 item	1 item	1 item	100%	1 paket	1 paket	100%
1	02	12	16	14		Optimalisasi penyusunan laporan kegiatan penanaman modal	Jumlah perusahaan yg dibina melalui kegiatan Optimalisasi penyusunan laporan kegiatan penanaman modal	30 perusahaan	30 perusahaan	30 perusahaan	30 perusahaan	100%	30 perusahaan	30 perusahaan	100%
1	02	12	16	18		Koordinasi antar lembaga dalam pengendalian pelaksanaan investasi PMDN/ PMA	Jumlah lembaga yg dikoordinasi kan melalui keg. koordinasi antar Instansi terkait guna pengendalian investasi PMDN/PMA	3 lembaga	3 lembaga	3 lembaga	3 lembaga	100%	-	-	-



**RENJA PERUBAHAN RANCANGAN **ACHIR** DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PTSP**

1	02	12	16	19		Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal	Jumlah perusahaan yg dipantau melalui kegiatan Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal	30 perusahaan	30 perusahaan	30 perusahaan	30 perusahaan	100%	200 Menara	200 Menara	100%
1	02	12	16	21		Revitalisasi Penyimpanan Dokumen Secara Elektronik	Jumlah penyimpanan dokumen arsip perijinan penanaman modal secara elektronik	24 jenis dokumen	24 jenis dokumen	24 jenis dokumen	24 jenis dokumen	100%	-	-	-
1	02	12	16	22		Fasilitasi program inovasi pembangunan daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi guna mendukung tercapainya kbrrrhasilan dalm investment Award	1 kali penilaian	1 kali penilaian	1 kali penilaian	1 kali penilaian	100%	1 kali penilaian	1 kali penilaian	100%
1	02	12	16	23		Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan terhadap ijin yang dikeluarkan	Jumlah perusahaan yg dimonitoring melalui kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap ijin penanaman modal	35 perusahaan	35 perusahaan	35 perusahaan	35 perusahaan	100%	35 perusahaan	35 perusahaan	100%
1	02	12	16	24		Peningkatan Pengelolaan Kearsipan	Jumlah jenis arsip yg dikelola mealalui kegiatan peningkatan pengelolaan kearsipan	24 jenis dokumen	24 jenis dokumen	24 jenis dokumen	24 jenis dokumen	100%	1 kali	1 kali	100%



**RENJA PERUBAHAN RANCANGAN **ACHIR** DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PTSP**

1	02	12	18			Peningkatan Pelayanan Perijinan	Prosentase Penyelesaian Ijin Online dan Offline tepat Waktu	98,25%	98,25%	98,25%	98,25%	100%	98,25%	98,25%	100%
1	02	12	18	15		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Perijinan	Jumlah jenis ijin yg diproses melalui kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Perijinan	3.500 ijin	3.500 ijin	3.500 ijin	3.500 ijin	100%	3.500 ijin	3.500 ijin	100%
1	02	12	18	16		Peningkatan Pelayanan Perijinan	Jumlah peserta kegiatan Peningkatan Pelayanan Perijinan	12 orang	12 orang	12 orang	12 orang	100%	12 orang	12 orang	100%
1	02	12	18	17		Survey Lapangan Terhadap Permohonan Ijin	Jumlah pemohon yg disurvei melalui kegiatan Survey Lapangan Terhadap Permohonan Ijin	48 pemohon	48 pemohon	48 pemohon	48 pemohon	100%	48 pemohon	48 pemohon	100%
1	02	12	18	18		Pengembangan sistim informasi pelayanan perijinan	Jumlah Pengembangan sistim informasi pelayanan perijinan	1 server	1 server	1 server	1 server	100%	-	-	-
1	02	12	18	19		Fasilitasi program peningkatan kualitas PTSP (Pelayanan terpadu satu pintu)	Jumlah peserta kegiatan Fasilitasi program peningkatan kualitas PTSP (Pelayanan terpadu satu pintu)	10 orang	10 orang	10 orang	10 orang	100%	75 pemohon	75 pemohon	100%





**RENJA PERUBAHAN RANCANGAN **ACHIR** DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PTSP**

1	02	12	18	20		Pelayanan Perijinan Jemput Bola	Jumlah pemohon ijin yg melalui kegiatan Pelayanan Perijinan Jemput Bola	50 pemohon	50 pemohon	50 pemohon	50 pemohon	100%	-	-	-
1	02	12	18	21		Implementasi sistem informasi perijinan dengan SPIPISE	Jumlah laporan kegiatan Implementasi sistem informasi perijinan dengan SPIPISE	12 kali laporan	12 kali laporan	12 kali laporan	12 kali laporan	100%	-	-	-
1	02	12	18	22		Pemeliharaan Sertifikasi ISO	Jumlah penilaian melalui kegiatan Pemeliharaan Sertifikasi ISO	1 kali penilaian	1 kali penilaian	1 kali penilaian	1 kali penilaian	100%	1 kali penilaian	1 kali penilaian	100%
1	02	12	18	23		Intensifikasi PAD IMB dan HO	Jumlah peserta kegiatan Intensifikasi PAD IMB dan HO	54 orang	54 orang	54 orang	54 orang	100%	54 orang	54 orang	100%



Evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja di atas, disimpulkan sebagai berikut :

1. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu didukung oleh 8 program, dimana didalamnya terdiri dari 3 program pendukung dan 5 program utama yang mana target kinerjanya telah tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Target kinerja program yang telah tercapai, meliputi :
  - a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
  - b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
  - c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
  - d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
  - e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan
  - f. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
  - g. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
  - h. Program Pelayanan Perijinan
2. Untuk mendukung pelaksanaan dari program yang ada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan memiliki 36 kegiatan yang terdiri dari 26 kegiatan pendukung dan 23 kegiatan utama yang mana target kinerja dari semua kegiatan tersebut telah teralisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Faktor-faktor penyebab terpenuhinya realisasi program/kegiatan yang sesuai dengan target kinerja program dan kegiatan yang telah ditetapkan adalah:

- a. Adanya perencanaan yang matang dalam penyusunan rencana kinerja sehingga realisasi program/kegiatan dapat dicapai sesuai harapan;
- b. Adanya koordinasi dan pemahaman tugas guna penyeimbangan dalam pelaksanaan program/kegiatan yang terarah serta relevansi antara program dan pagu anggaran yang tersedia.
- c. Adanya sumber daya aparatur, sarana, dan prasarana pendukung serta sumber dana pendukung kegiatan dari APBD Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020 yang selaras dengan pencapaian target masing-masing kegiatan.

## **2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu



## **RENJA PERUBAHAN RANCANGAN **ACHIR** DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP**

Satu Pintu Kabupaten Lamongan didasarkan pada kajian capaian kinerja pelayanan sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, disajikan pada tabel, sebagaiberikut :



**Tabel T-C.30**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan**

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian	Proyeksi		Catatan Analisis
				2018	2019	2020	2021	2019	2020	2021	
1	Prosentase realisasi Investasi PMDN	-	-	18,00%	24,00%	30,00%	36,00%	68,22%	30,00%	36,00%	Terpenuhi
2	Peningkatan jumla nilai realisasi Investasi PMA	-	-	1.692.132.003.902	184.596.222.438	199.979.240.975	215.362.259.511	185.137.131.645	199.979.240.975	215.362.259.511	Terpenuhi
3	Prosentase Realisasi Investor PMDN	-	-	18,00%	24,00%	30,00%	36,00%	51,83%	30,00%	36,00%	Terpenuhi
4	Prosentase penyelesaian ijin tepat waktu	-	-	98,25%	98,30%	98,39%	98,40%	99,41%	98,39%	98,40%	Terpenuhi



### **2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah**

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggung jawabkan dan menjawab persoalan nyata yang dihadapi dalam pembangunan. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah kondisi yang menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah di masa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apa bila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Adapun Isu-isu penting Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan adalah :

1. Target peningkatan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lamongan yang mencapai 5,5 – 6,5 % per tahun, dengan salah satu tumpuannya adalah peningkatan realisasi investasi.
2. Harapan masyarakat yang tinggi terhadap pelayanan publik pemerintah Kabupaten Lamongan terutama terkait dengan pelayanan perijinan yang tepat waktu.

### **2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD**

Rencana Kerja ( Renja ) perubahan merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD ) Tahun 2021 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan setiap tahunnya.

Dokumen Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2021 yang disusun ini memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran serta rencana capaiannya yang merupakan tolak ukur keberhasilan dari tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan.

Disamping itu juga, dokumen Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2021 yang disusun ini memuat informasi tentang program, kegiatan, indikator kinerja dan rencana capaiannya. Melalui dokumen Rencana Kerja (Renja) Perubahan ini akan diketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya



serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan.

Program dan kegiatan Tahun 2021 yang telah diusulkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan merupakan rancangan awal Rencana Kerja (Renja) Perubahan yang akan dilaksanakan Tahun 2021 dan telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Lamongan sebagaimana pada tabel dibawah ini .



**REJA PERUBAHAN RANCANGAN AKHIR DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PTSP**

**Tabel T-C.31**  
**Review Terhadap Rancangan awal RKPD Tahun 2021**  
**Kabupaten Lamongan**

No	Rancangan Awal					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
1	2		4	5	6	2		4	5	6	
	<b>Wajib</b>					<b>Wajib</b>					
	Penanaman Modal Daerah				6.118.602.376	Penanaman Modal Daerah				6.118.602.376	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	DPMPPTSP	Prosentase Unit Kerja Internal yang terlayani dengan baik	80%	4.875.440.376	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	DPMPPTSP	Prosentase Unit Kerja Internal yang terlayani dengan baik	80%	4.875.440.376	
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	5 dokumen	10.000.000	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DPM PTSP	Jumlah perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	5 dokumen	10.000.000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan	1 dokumen	5.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DPM PTSP	Jumlah dokumen perencanaan	1 dokumen	5.000.000	
			Jumlah dokumen Renstra dan Renja	3 dokumen				Jumlah dokumen Renstra dan Renja	3 dokumen		
	Evaluasi Kinerja perangkat daerah		Jumlah dokumen evaluasi	1 dokumen	5.000.000	Evaluasi Kinerja perangkat daerah	DPM PTSP	Jumlah dokumen evaluasi	1 dokumen	5.000.000	APBD Kab.
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Administrasi Keuangan	7 dokumen	3.268.771.988	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	DPM PTSP	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan	7 dokumen	3.268.771.988	APBD Kab.
	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN		Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan	27 org	3.258.711.988	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	DPM PTSP	Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan	27 org	3.258.711.988	APBD Kab.



## RENJA PERUBAHAN RANCANGAN AKHIR DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	1 dokumen	5.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	DPM PTSP	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	1 dokumen	5.000.000	APBD Kab.
	Koordinasi dan Penyusunan laporan keuangan Bulanan/tribulan/semesteran SKPD		Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja semesteran ahir tahun	1 dokumen	5.000.000	Koordinasi dan Penyusunan laporan keuangan Bulanan/tribulan/semesteran SKPD		Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja semesteran ahir tahun	1 dokumen	5.000.000	
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		<b>Jumlah administrasi kepegawaian yang dipenuhi</b>	<b>2 administrasi</b>	<b>25.000.000</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	DPM PTSP	<b>Jumlah administrasi kepegawaian yang dipenuhi</b>	<b>2 administrasi</b>	<b>25.000.000</b>	APBD Kab.
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Pemenuhan pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	56 Stel	25.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	DPM PTSP	Jumlah Pemenuhan pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	56 Stel	25.000.000	APBD Kab.
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah peserta yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan formal	9 orang	0	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	DPM PTSP	Jumlah peserta yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan formal	9 orang	0	APBD Kab.
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>Jumlah Administrasi Umum yang dipenuhi</b>	<b>6 Administrasi</b>	<b>200.000.000</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	DPM PTSP	<b>Jumlah Administrasi Umum yang dipenuhi</b>	<b>6 Administrasi</b>	<b>200.000.000</b>	APBD Kab.
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah alat listrik dan elektronik	15 item	20.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	DPM PTSP	Jumlah alat listrik dan elektronik	15 item	20.000.000	APBD Kab.
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah peralatan rumah tangga yang dipenuhi	6 jenis	20.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	DPM PTSP	Jumlah peralatan rumah tangga yang dipenuhi	6 jenis	20.000.000	APBD Kab.
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Alat Tulis Kantor	69 jenis	50.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	DPM PTSP	Jumlah Alat Tulis Kantor	69 jenis	50.000.000	APBD Kab.
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah barang cetakan dan penggandaan	5 jenis	40.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	DPM PTSP	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	5 jenis	40.000.000	APBD Kab.
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah bahan bacaan	8 media	20.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	DPM PTSP	Jumlah bahan bacaan	8 media	20.000.000	APBD Kab.





## RENJA PERUBAHAN RANCANGAN **ACHIR** DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah makan dan minuman	9 Jenis	50.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DPM PTSP	Jumlah makan dan minuman	9 Jenis	50.000.000	APBD Kab.
			Jumlah perjalanan dinas dalam daerah/luar daerah	124 Perjalanan				Jumlah perjalanan dinas dalam daerah/luar daerah	124 Perjalanan		
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		Jumlah Jenis Pengadaan	2 jenis	241.649.350	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	DPM PTSP	Jumlah Jenis Pengadaan	2 jenis	241.649.350	APBD Kab.
	Pengadaan Mebel		Jumlah pengadaan meubelair	1 Set	156.829.750	Pengadaan Mebel	DPM PTSP	Jumlah pengadaan meubelair	1 Set	156.829.750	APBD Kab.
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Pengadaan Peralatan, perlengkapan kantor, computer, notebook, dan printer	1 Buah PC dan 1 Buah Printer	84.819.600	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DPM PTSP	Jumlah Pengadaan Peralatan, perlengkapan kantor, computer, notebook, dan printer	1 Buah PC dan 1 Buah Printer	84.819.600	APBD Kab.
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		Jumlah jenis jasa penunjang urusan pemerintah daerah	3 Jenis	896.018.095	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	DPM PTSP	Jumlah jenis jasa penunjang urusan pemerintah daerah	3 Jenis	896.018.095	APBD Kab.
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah rekening yang dibayar	4 Rekening	123.532.095	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	DPM PTSP	Jumlah rekening yang dibayar	4 Rekening	123.532.095	APBD Kab.
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah jasa perlengkapan dan peralatan kantor	40 Buah	14.050.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DPM PTSP	Jumlah jasa perlengkapan dan peralatan kantor	40 Buah	14.050.000	APBD Kab.
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah tenaga administrasi	15 Orang	758.436.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	DPM PTSP	Jumlah tenaga administrasi	15 Orang	758.436.000	APBD Kab.
			Jumlah tenaga kebersihan, pengamanan, petugas parkir dan pengemudi	11 Orang				Jumlah tenaga kebersihan, pengamanan, petugas parkir dan pengemudi	11 Orang		
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		Jumlah barang yang dipelihara	4 Jenis	234.000.943	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	DPM PTSP	Jumlah barang yang dipelihara	4 Jenis	234.000.943	APBD Kab.



**RENJA PERUBAHAN RANCANGAN AKHIR DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PTSP**

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara	5 Mobil	37.000.0000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	DPM PTSP	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara	5 Mobil	37.000.0000	APBD Kab.
		Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara	11 Motor				Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara	11 Motor		
		Jumlah mobil jabatan yang dipelihara	2 Unit				Jumlah mobil jabatan yang dipelihara	2 Unit		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara	3 Unit	20.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara	3 Unit	20.000.000	APBD Kab.
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah peralatan yang dipelihara	20 Unit	20.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DPM PTSP	Jumlah peralatan yang dipelihara	20 Unit	20.000.000	APBD Kab.
		Jumlah perlengkapan yang dipelihara	20 Unit				Jumlah perlengkapan yang dipelihara	20 Unit		
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah gedung yang dipelihara	2 Gedung	157.000.943	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	DPM PTSP	Jumlah gedung yang dipelihara	2 Gedung	157.000.943	APBD Kab.
<b>Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal</b>	DPMPTSP	<b>Prosentase peningkatan Jumlah Investor</b>	<b>4%</b>	<b>480.000</b>	<b>Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal</b>	DPMPTSP	<b>Prosentase peningkatan Jumlah Investor</b>	<b>4%</b>	<b>480.000</b>	APBD Kab.
Penetapan Pemberian Fasilitas / Inisiatif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten atau Kota		Jumlah Fasilitas / Insentif Penanaman Modal	35%	320.000	Penetapan Pemberian Fasilitas / Inisiatif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten atau Kota		Jumlah Fasilitas / Insentif Penanaman Modal	35%	320.000	APBD Kab.



**RENJA PERUBAHAN RANCANGAN **ACHIR** DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PTSP**

	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas / Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal		Jumlah Peserta Sosialisasi	35 Peserta	320.000	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas / Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal		Jumlah Peserta Sosialisasi	35 Peserta	320.000	APBD Kab.
	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota		Jumlah Data untuk Peta Potensi Investasi	1 Dokumen	160.000	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota		Jumlah Data untuk Peta Potensi Investasi	1 Dokumen	160.000	APBD Kab.
	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten / Kota		Jumlah Potensi dan Peluang Usaha yang di Update	27 Kecamatan	160.000	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten / Kota		Jumlah Potensi dan Peluang Usaha yang di Update	27 Kecamatan	160.000	APBD Kab.
	Program Promosi Penanaman Modal	DPMPTSP	Prosentase Peningkatan Investor Penanam Modal	4 %	150.000.000	Program Promosi Penanaman Modal	DPMPTSP	Prosentase Peningkatan Investor Penanam Modal	4 %	150.000.000	APBD Kab.
	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal Yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Promosi yang dilaksanakan	2 Kegiatan	150.000.000	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal Yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Promosi yang dilaksanakan	2 Kegiatan	150.000.000	APBD Kab.
	Penyusunan strategi Promosi Penanaman Modal		Jumlah Dokumen Strategi Penanaman Modal	50 Buku  1 Dokumentasi Film/Vidio	85.500.000	Penyusunan strategi Promosi Penanaman Modal		Jumlah Dokumen Strategi Penanaman Modal	50 Buku  1 Dokumentasi Film/Vidio	85.500.000	APBD Kab.
	Pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Pengunjung Calon Investor	135 Pengunjung	64.500.000	Pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Pengunjung Calon Investor	135 Pengunjung	64.500.000	APBD Kab.
			Jumlah Pemeliharaan Baliho	30 Pemeliharaan				Jumlah Pemeliharaan Baliho	30 Pemeliharaan		APBD Kab.



## RENJA PERUBAHAN RANCANGAN **ACHIR** DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

2	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	DPMPTSP	Prosentase Penyelesaian Ijin Offline dan Online Tepat Waktu	98,40%	670.220.000	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	DPMPTSP	Prosentase Penyelesaian Ijin Offline dan Online Tepat Waktu	98,40%	670.220.000	APBD Kab.
2	Pelayanan Perizinan dan Non perizinan secara terpadu satu pintu di biang penanaman modal		Jumlah Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	2505 Izin	670.220.000	Pelayanan Perizinan dan Non perizinan secara terpadu satu pintu di biang penanaman modal		Jumlah Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	2505 Izin	670.220.000	APBD Kab.
2	Penyediaan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha strategis secara elektronik		Jumlah Pelayanan Izin Pra Usaha yang diterbitkan	1000 Izin	650.220.000	Penyediaan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha strategis secara elektronik		Jumlah Pelayanan Izin Pra Usaha yang diterbitkan	1000 Izin	650.220.000	APBD Kab.
			Jumlah Izin Usaha yang diterbitkan	1500 Izin				Jumlah Izin Usaha yang diterbitkan	1500 Izin		APBD Kab.
			Jumlah Izin Non Perizinan yang diterbitkan	5 Izin				Jumlah Izin Non Perizinan yang diterbitkan	5 Izin		APBD Kab.
2	Pemantauan pemenuhan komitmen perizinan dan non perizinan penanaman modal		Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi	1000 pengusaha	20.000.000	Pemantauan pemenuhan komitmen perizinan dan non perizinan penanaman modal		Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi	1000 pengusaha	20.000.000	APBD Kab.
2	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	DPMPTSP	Prosentase Peningkatan Investasi	36 %	372.462.000	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	DPMPTSP	Prosentase Peningkatan Investasi	36 %	372.462.000	APBD Kab.
2	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten /Kota		Jumlah Perusahaan yang Berinvestasi	250 Perusahaan	372.462.000	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten /Kota		Jumlah Perusahaan yang Berinvestasi	250 Perusahaan	372.462.000	APBD Kab.



## RENJA PERUBAHAN RANCANGAN **ACHIR** DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

2	Koordinasi dan sinkronisasi pemantauan pelaksanaan penanaman modal		Jumlah Perusahaan Yang Terpantau Perkembangannya Melalui Pelaksanaan Penanaman Modal	250 perusahaan	0	Koordinasi dan sinkronisasi pemantauan pelaksanaan penanaman modal		Jumlah Perusahaan Yang Terpantau Perkembangannya Melalui Pelaksanaan Penanaman Modal	250 perusahaan	0	APBD Kab.
2	Koordinasi dan sinkronisasi Pembinaan pelaksanaan penanaman modal		Jumlah Perusahaan yang Dibina Melalui Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	30 Perusahaan	0	Koordinasi dan sinkronisasi Pembinaan pelaksanaan penanaman modal		Jumlah Perusahaan yang Dibina Melalui Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	30 Perusahaan	0	APBD Kab.
	Koordinasi dan sinkronisasi Pengawasan pelaksanaan penanaman modal		Jumlah Perusahaan PMA/PMDN yang diawasi	100 Unit	372.462.00	Koordinasi dan sinkronisasi Pengawasan pelaksanaan penanaman modal		Jumlah Perusahaan PMA/PMDN yang diawasi	100 Unit	372.462.00	
2	<b>Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal</b>	DPMPTSP	Prosentase Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	100%	50.000.000	<b>Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal</b>	MPPTSP	Prosentase Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	100%	50.000.000	APBD Kab.
2	<b>Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>		Jumlah Perijinan dan Non Perijinan yang Terintegrasi	63 Perijinan	50.000.000	<b>Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>		Jumlah Perijinan dan Non Perijinan yang Terintegrasi	63 Perijinan	50.000.000	APBD Kab.
	Pengolahan, penyajian dan pemanfaatan data dan informasi perizinan dan Non perizinan berbasis sitem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik		Jumlah Data Perijinan dan Non Perijinan yang Dikelola dan Terintegrasi Secara Elektronik	56 Perijinan dan 7 Non Perijinan	50.000.000	Pengolahan, penyajian dan pemanfaatan data dan informasi perizinan dan Non perizinan berbasis sitem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik		Jumlah Data Perijinan dan Non Perijinan yang Dikelola dan Terintegrasi Secara Elektronik	56 Perijinan dan 7 Non Perijinan	50.000.000	
<b>TOTAL DANA ANGGARAN</b>					<b>6.118.602.376</b>	<i>APBD kab</i>				<b>6.118.602.376</b>	



## **2.5 Penelaahan Usulan Program Kegiatan masyarakat**

Program/kegiatan usulan pemangku kepentingan sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 merupakan suatu hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan propinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Propinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah propinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan sebagai Perangkat Daerah dengan tugas membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Penanaman Modal dan Perijinan dimana peran masyarakat sangat penting dalam mendukung semua program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan dalam hal ini mengkoordinasikan program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan yang nantinya ditujukan langsung kepada Perangkat Daerah terkait.



**Tabel T-C.32**

**Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2021  
Kabupaten Lamongan**

Nama OPD : Dinas Penanaman Modal dan PTSP

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator/Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	<b>NIHIL</b>				



### **BAB III**

#### **TUJUAN DAN SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN**

Dalam perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah selain didasarkan pada rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat daerah juga dilakukan penelaahan terhadap Kebijakan Nasional.

##### **3.1 Telaahan Terdapat Kebijakan Nasional dan Provinsi**

Arah kebijakan dan strategi nasional di bidang penanaman modal dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 pada agenda pembangunan nasional nomor 6 (enam), **“Meningkatkan Produktivitas Rakyat dan Daya Saing di Pasar Internasional”**, dengan sub agenda prioritas **“Penguatan Investasi”**. Sasaran yang hendak dicapai dalam rangka “Penguatan Investasi” untuk lima tahun ke depan adalah:

1. Menurunnya waktu pemrosesan perizinan investasi nasional di pusat dan di daerah menjadi maksimal 15 hari per jenis perizinan pada tahun 2019.
2. Menurunnya waktu dan jumlah prosedur untuk memulai usaha (starting abusiness) menjadi 7 hari dan menjadi 5 prosedur pada tahun 2019, sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan peringkat Indonesia pada Ease of Doing Business (EoDB).
3. Meningkatnya pertumbuhan investasi atau Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) njadisebesar 12,1% pada tahun 2019.
4. Meningkatnya investasi PMA dan PMDN menjadi Rp 933 triliun pada tahun 2019 dengan kontribusi PMDN yang semakin meningkat menjadi 38,9%.

Arah Kebijakan :

Penguatan investasi ditempuh melalui dua pilar kebijakan yaitu :

1. peningkatan iklim investasi dan iklim usaha untuk meningkatkan efisiensi proses perizinan bisnis;
2. Peningkatan investasi yang inklusif terutama dari investor domestik. Kedua pilar kebijakan ini akan dilakukan secara terintegrasi baik di tingkat pusat maupun di daerah.





### **3.2 Tujuan Dan Sasaran Renja Perangkat Daerah**

Visi yang termuat dalam RPJMD merupakan visi Bupati/Wakil Bupati terpilih pada pemilu pada yang dilaksanakan tanggal 9 Desember 2015. Sebagaimana disampaikan pada pemaparan visi dan misi calon Bupati/Wakil Bupati di sidang DPRD dan sejalan dengan arah kebijakan pembangunan daerah yang termuat dalam tahapan ketiga Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lamongan Tahun 2005-2025 dan RTRW Kabupaten Lamongan Tahun 2011-2031, Visi tersebut juga disinergikan dengan RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 serta RPJM Nasional Tahun 2015-2019 (NAWACITA). Dari hasil integrasi dan harmonisasi beberapa kebijakan tersebut ditetapkan visi Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021, adalah:

#### **"Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing"**

Pemahaman atas pernyataan visi tersebut mengandung makna terjalannya sinergi yang dinamis antara masyarakat, Pemerintah Kabupaten dan seluruh *stakeholder's* dalam merealisasikan dan semakin memantapkan pembangunan Kabupaten Lamongan secara komprehensif.

Secara filosofis visi tersebut dapat dijelaskan melalui makna yang terkandung di dalamnya, yaitu :

- 1) **Terwujudnya** terkandung upaya melanjutkan peran Pemerintah Daerah dalam mewujudkan Kabupaten Lamongan yang Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing.
- 2) **Lamongan** adalah satu kesatuan masyarakat hukum dengan segala potensi dan sumber dayanya dalam sistem Pemerintahan di Wilayah Kabupaten Lamongan.
- 3) **Lebih Sejahtera** dalam pengertian semakin mantap dan tercukupinya kebutuhan lahiriah dan batiniah yang ditandai dengan meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat. Kesejahteraan yang akan diwujudkan adalah suatu tatanan yang sesuai dengan kondisi sosial-budaya-agama masyarakat dan kearifan lokal Kabupaten Lamongan.



- 4) **Lebih Berdaya saing** dalam pengertian terwujudnya peningkatan lebih lanjut keunggulan komparatif dan kompetitif daerah, sehingga mampu bersaing secara optimal dengan mengembangkan dan memanfaatkan segala potensi yang dimiliki dalam persaingan ditingkat Global.

Untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Lamongan 2016-2021, **“Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing”** ditempuh melalui lima misi sebagai berikut :

**Misi 1.**

**Mewujudkan Sumber Daya Manusia berdaya saing melalui peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan**, dengan penjelasan sebagai berikut:

Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lamongan yang memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif melalui peningkatan akses serta kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan. Pelayanan pendidikan dan kesehatan yang sudah baik, semakin dimantapkan guna menghadapi tantangan pembangunan di masa yang akan datang.

**Misi 2.**

**Mengembangkan perekonomian yang berdaya saing dengan mengoptimalkan potensi daerah**, dengan penjelasan sebagai berikut:

Misi ini dimaksudkan untuk memantapkan perekonomian Kabupaten Lamongan menjadi lebih mandiri dan berdaya saing, dengan menggali dan mengembangkan semua potensi yang dimiliki. Potensi-potensi daerah sebagai penggerak perekonomian diantaranya pertanian, perikanan, peternakan, perdagangan, industri dan pariwisata.

**Misi 3.**

**Memantapkan sarana dan prasarana dasar dengan menjaga kelestarian lingkungan**, dengan penjelasan sebagai berikut:

Misi ini dimaksudkan untuk memantapkan penyediaan infrastruktur dasar berupa jalan, jembatan, perhubungan, permukiman, air bersih serta sarana penunjang produksi barang dan jasa yang keseluruhannya dapat menunjang akses perekonomian.



Pemantapan infrastruktur dasar dilaksanakan dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan melalui peningkatan kualitas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

**Misi 4.**

**Mewujudkan Reformasi birokrasi bagi pemenuhan pelayanan publik**, dengan penjelasan sebagai berikut:

Misi ini dimaksudkan untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pelayanan publik yang profesional. Prinsip tersebut dilaksanakan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dengan mengedepankan kepentingan dan aspirasi masyarakat.

**Misi 5.**

**Memantapkan kehidupan masyarakat yang tenteram dan damai dengan menjunjung tinggi budaya lokal**, dengan penjelasan sebagai berikut :

Misi ini dimaksudkan untuk memantapkan kehidupan masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar pangan, sandang dan papandangan didukung kondisi stabilitas politik dan pemerintahan yang aman, tenteram serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama, sosial dan budaya.

Untuk menerjemahkan Visi dan Misi pada RPJMD Kabupaten Lamongan ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan, maka dapat ditelaah dari Misi ke 2 (dua) dan Misi 4 (empat) dan Tujuan 1 (satu) dari RPJMD Kabupaten Lamongan.

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat daerah serta mengacu pada tujuan dan sasaran target kinerja Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan Tahun 2016 – 2021, yaitu :



### Tujuan

1. Meningkatkan Investasi Daerah( Misi 2 )  
Indikator :Prosentase Realisasi Investasi
2. Meningkatkan Pelayanan Perijinan( Misi 4 )  
Indikator :IKM/SKM Layanan Perijinan

### Sasaran

1. Meningkatnya Investasi Daerah baik PMDN maupun PMA( Misi 2 )  
Indikator :
  - Prosentase Realisasi Investasi PMDN
  - Peningkatan Jumlah nilai Realisasi Investasi PMA
  - Prosentase Realisasi Investor PMDN
2. Meningkatnya Pelayanan Perijinan ( Misi 4 )  
Indikator :

1. Prosentase Penyelesaian Ijin Tepat Waktu

Target tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu Kabupaten Lamongan tahun 2021 adalah sebagaimana tabel berikut :

**Tujuan Dan Sasaran  
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Lamongan**

TUJUAN	SASARAN		2021	KONDISI AKHIR
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA		
1	2	3	11	12
Meningkatkan Investasi Daerah	Meningkatnya Investasi Daerah	1. Prosentase realisasi Investasi PMDN	36,00%	36,00%
		2. Peningkatan jumlah nilai realisasi Investasi PMA	215.362.259.511	215.362.259.511
		3. Prosentase realisasi Investor PMDN	36,00%	36,00%
Meningkatkan Pelayanan Perijinan	Meningkatnya Pelayanan Perijinan	IKM/SKM Layanan perijinan	81,76	81,76
		Prosentase penyelesaian ijin tepat waktu	98,40%	98,40%



### **3.3 Program Dan Kegiatan**

Rumusan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

### **3.4 Program Dan Kegiatan**

Rumusan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan Tahun 2021 adalah terdiri dari 6 program dengan 10 Kegiatan dan 37 sub kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 6.882.945.000,- ( Enam Milyard delapan ratus delapan puluh ua juta sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah ) adapun rincian program dan kegiatan adalah sebagai berikut :

#### **I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan kegiatan :**

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - Sub kegiatan Penyusunan dokumen evaluasi perangkat daerah
  - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Kegiatan Administrasi Keuangan
  - Sub kegiatan :
    - Penyediaan gaji dan tunjangan ASN
    - Koordinasi dan Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
    - Koordinasi dan Penyusunan laporan keuangan bulnan, Triwulanan/ Semesteran SKPD
3. Kegiatan Administrasi umum
  - Sub kegiatan :
    - Penyediaan jasa surat menyurat
    - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
    - Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor



## **RENJA PERUBAHAN RANCANGAN **ACHIR** DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP**

- Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
  - Penyediaan jasa administrasi keuangan
  - Penyediaan jasa kebersihan kantor
  - Penyediaan alat tulis kantor
  - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
  - Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
  - Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
  - Penyediaan peralatan rumah tangga
  - Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
  - Penyediaan makanan dan minuman
  - Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
  - Pengadaan peralatan gedung kantor
  - Pengadaan Meubelair
  - Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
  - Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
  - Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
  - Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
4. Kegiatan pembinaan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur
- Sub Kegiatan
- Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
  - Pengadaan pakaian kerja lapangan
  - Pendidikan dan pelatihan formal

### **II. Program pengembangan iklim penanaman modal**

1. Kegiatan penetapan pemberian fasilitas/inisiatif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten atau kota
- Sub kegiatan :
- Evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal
2. Kegiatan pembuatan peta potensi investasi kabupaten/kota Sub kegiatan :
- Penyediaan peta potensi dan peluang usaha kabupaten / kota



**III. Program promosi penanaman modal**

1. Kegiatan penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota

Sub kegiatan

- Penyusunan strategi promosi penanaman modal
- Pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal daerah kabupaten/kota

**IV. Program pelayanan penanaman modal**

1. Kegiatan pelayanan perijinan dan non perijinan secara terpadu satu pintu di bidang penanaman modal

Sub kegiatan

- Penyediaan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perijinan berusaha strategis secara elektronik
- Pemantauan pemenuhan komitmen perizinan dan non perizinan penanaman modal

**V. Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal**

1. Kegiatan pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota

Sub kegiatan

- Koordinasi dan sinkronisasi pemantauan pelaksanaan penanaman modal
- Koordinasi dan sinkronisasi pembinaan pelaksanaan penanaman modal

**VI. Program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal**

1. Kegiatan pengelolaan data dan informasi perizinan yang terinterasi sub kegiatan

- Pengolahan, penyajian dan pemanfaatan data dan informasi perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik



## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Rencana kerja dan pendanaan tahun 2021 berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif, yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian visi, misi dan tujuan RPJMD Kabupaten Lamongan 2016-2021 dan untuk mendukung prioritas pembangunan daerah, dan prioritas perangkat daerah dalam pemenuhan standar pelayanan minimal, maupun untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah.

Untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Lamongan 2016-2021, yaitu **“Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing”** ditempuh melalui lima misi. Oleh Karena itu untuk menerjemahkan Visi dan Misi pada RPJMD Kabupaten Lamongan kedalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan, maka dapat ditelaah dari Misi Ke 2 (dua) yaitu Mengembangkan perekonomian yang berdaya saing dengan mengoptimalkan potensi daerah dan Tujuan Meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui optimalisasi potensi daerah dan ekonomi kerakyatan untuk mewujudkan peningkatan pendapatan masyarakat, dan Misi 4 (empat) yaitu “Mewujudkan Reformasi Birokrasi Bagi Pemenuhan Pelayanan Publik” dan Tujuan 1 (satu) dari RPJMD Kabupaten Lamongan yaitu “Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional dan akuntabel untuk Peningkatan Pelayanan Publik”.

Selaku Perangkat Daerah penunjang bidang Penanaman Modal, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan dalam mendukung Pembangunan sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021.





**RENJA PERUBAHAN RANCANGAN **ACHIR** DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PTSP**

**Tabel. T-C.33**  
**RUMUSAN RENCANA AHIR POROGRAM DAN KEGIATAN PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021**

Nomor Rekening					Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan		Lokasi Kegiatan		Perubahan/Penggeseran Alokasi Anggaran				Keterangan
						Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Perubahan Perubub	Sesudah Perubahan	Bertambah /Berkurang	
1					2	3	5	3	5	4		6				7
2	18				Penanaman Modal Daerah							7.915.505.000	6.882.945.00	6.118.602.376	-	
2	18	01	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase Unit Kerja Internal yang Terlayani Dengan Baik	100%	Prosentase Unit Kerja Internal yang Terlayani Dengan Baik	100%			6.392.543.000	5.639.783.000	4.875.440.376	-	
2	18	01	2.01		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Dokumen	Jumlah Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Dokumen			65.000.000	10.000.000	10.000.000	-	
2	18	01	2.01	01	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen Renstra dan Renja	3 dokumen	Jumlah dokumen Renstra dan Renja	3 dokumen	DPM PTSP	DPM PTSP	37.500.000	5.000.000	5.000.000		
2	18					Jumlah dokumen perencanaan	1 dokumen	Jumlah dokumen perencanaan	1 dokumen	DPM PTSP	DPM PTSP		-			
2	18	01	2.01	05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi	1 dokumen	Jumlah dokumen evaluasi	1 dokumen	DPM PTSP	DPM PTSP	27.500.000	5.000.000	5.000.000		
2	18	01	2.02		Administrasi Keuangan	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan	7 Laporan	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan	7 Laporan			3.869.257.000	3.530.997.000	3.268.771.988	-	
2	18	01	2.02	01	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan	27 org	Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan	27 org	DPM PTSP	DPM PTSP	3.814.257.000	3.520.997.000	3.258.771.988		
2	18	01	2.02	06	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar kinerja	1 dokumen	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar kinerja	1 dokumen	DPM PTSP	DPM PTSP	27.500.000	5.000.000	5.000.000		



## RENJA PERUBAHAN RANCANGAN **ACHIR** DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

						Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun	3 dokumen	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun	3 dokumen	DPM PTSP	DPM PTSP		-	-		
2	18	01	2.02	07	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja semesteran akhir tahun	1 dokumen	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja semesteran akhir tahun	1 dokumen	DPM PTSP	DPM PTSP	27.500.000	5.000.000	5.000.000		
2	18	01	2.05		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Administrasi kepegawaian yg dipenuhi</b>	<b>2 Administrasi</b>	<b>Jumlah Administrasi kepegawaian yg dipenuhi</b>	<b>2 Administrasi</b>	DPM PTSP	DPM PTSP	<b>75.000.000</b>	25.000.000	25.000.000	-	
2	18	01	2.05	02	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya	56 Stel	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya	56 Stel	DPM PTSP	DPM PTSP	50.000.000	25.000.000	25.000.000		
2	18	01	2.05	09	Pendidikan an pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah perta yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	9 orang	Jumlah perta yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	9 orang	DPM PTSP	DPM PTSP	25.000.000	-	0		
2	18	01	2.06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Administrasi Umum yang dipenuhi</b>	<b>6 Administrasi</b>	<b>Jumlah Administrasi Umum yang dipenuhi</b>	<b>6 Administrasi</b>	DPM PTSP	DPM PTSP	<b>235.000.000</b>	200.000.000	200.000.000	-	
2	18	01	2.06	01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah alat Listrik dan elektronik	15 item	Jumlah alat Listrik dan elektronik	15 item	DPM PTSP	DPM PTSP	30.000.000	20.000.000	20.000.000		
2	18	01	2.06	03	Penyediaan peralatan Rumah tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang dipenuhi	6 Jenis	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang dipenuhi	6 Jenis	DPM PTSP	DPM PTSP	20.000.000	20.000.000	20.000.000		
2	18	01	2.06	04	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor	69 Jenis	Jumlah Alat Tulis Kantor	69 Jenis	DPM PTSP	DPM PTSP	50.000.000	50.000.000	50.000.000		
2	18	01	2.06	05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	15000 Lembar dan 5 Jenis	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	15000 Lembar dan 5 Jenis	DPM PTSP	DPM PTSP	40.000.000	40.000.000	40.000.000		
2	18	01	2.06	06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan	8 media	Jumlah bahan bacaan	8 media	DPM PTSP	DPM PTSP	20.000.000	20.000.000	20.000.000		



## RENJA PERUBAHAN RANCANGAN **ACHIR** DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

2	18	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah perjalanan dinas dalam daerah/luar daerah	124 Perjalanan	Jumlah perjalanan dinas dalam daerah/luar daerah	124 Perjalanan	DPM PTSP	DPM PTSP	75.000.000	50.000.000	50.000.000		
						Jumlah makan dan minum	9 Jenis	Jumlah makan dan minum	9 Jenis	DPM PTSP	DPM PTSP		-			
2	18	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	Jumlah jenis pengadaan	2 jenis	Jumlah jenis pengadaan	2 jenis	DPM PTSP	DPM PTSP	75.000.000	-	241.649.350	-	
2	18	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah pengadaan meubelair	1 set	Jumlah pengadaan meubelair	1 set	DPM PTSP	DPM PTSP	25.000.000	-	156.829.750		
2	18	01	2.07	06	Penyediaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah pengadaan peralatan perlengkapan kantor: komputer, notebook, printer	1 Buah PC dan 1 Buah Printer	Jumlah pengadaan peralatan perlengkapan kantor: komputer, notebook, printer	1 Buah PC dan 1 Buah Printer	DPM PTSP	DPM PTSP	50.000.000	-	84.819.600		
2	18	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Jasa Penunjang	3 jenis	Jumlah Jenis Jasa Penunjang	3 jenis	DPM PTSP	DPM PTSP	1.891.286.000	1.766.786.000	896.018.095	-	
2	18	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening yg dibayar	4 rekening	Jumlah rekening yg dibayar	4 rekening	DPM PTSP	DPM PTSP	1.000.000.000	994.300.000	123.532.095		
2	18	01	2.08	03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah jasa perlengkapan dan peralatan kantor	40 buah	Jumlah jasa perlengkapan dan peralatan kantor	40 buah	DPM PTSP	DPM PTSP	14.050.000	14.050.000	14.050.000		
2	18	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga administrasi	15 Orang	Jumlah tenaga administrasi	15 Orang	DPM PTSP	DPM PTSP	877.236.000	758.436.000	758.436.000		
						Jumlah tenaga kebersihan, pengamanan, petugas parkir dan pengemudi	11 Orang	Jumlah tenaga kebersihan, pengamanan, petugas parkir dan pengemudi	11 Orang	DPM PTSP	DPM PTSP		-			
2	18	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis Barang yang dipelihara	4 Jenis	Jenis Barang yang dipelihara	4 Jenis	DPMPPTSP	DPMPPTSP	182.000.000	107.000.000	234.000.943	-	
2	18	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara	5 Mobil	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara	5 Mobil	DPM PTSP	DPM PTSP	37.000.000	37.000.000	37.000.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara	11 Motor	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara	11 Motor	DPM PTSP	DPM PTSP		-			
						Jumlah mobil jabatan yang dipelihara	2 Unit	Jumlah mobil jabatan yang dipelihara	2 Unit	DPM PTSP	DPM PTSP		-			
2	18	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara	3 Unit	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara	3 Unit	DPM PTSP	DPM PTSP	50.000.000	25.000.000	20.000.000		



## RENJA PERUBAHAN RANCANGAN **ACHIR** DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

2	18	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dipelihara	20 Unit	Jumlah peralatan dipelihara	20 Unit	DPM PTSP	DPM PTSP	45.000.000	20.000.000	20.000.000		
						Jumlah perlengkapan yang dipelihara	20 Unit	Jumlah perlengkapan yang dipelihara	20 Unit	DPM PTSP	DPM PTSP		-			
2	18	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung yg dipelihara	2 gedung	Jumlah gedung yg dipelihara	2 gedung	DPM PTSP	DPM PTSP	50.000.000	25.000.000	157.000.943		
2	18	02			Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Prosentase peningkatan Jumlah Investor	4%	Prosentase peningkatan Jumlah Investor	4%	DPM PTSP	DPM PTSP	80.000.000	480.000	480.000	-	
2	18	02	2.01		Penetapan Pemberian Fasilitas / Inisiatif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten atau Kota	Jumlah Fasilitas / Insentif Penanaman Modal	35 Peserta	Jumlah Fasilitas / Insentif Penanaman Modal	35 Peserta	DPM PTSP	DPM PTSP	30.000.000	320.000	320.000	-	
2	18	02	2.01	02	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas / Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah peserta sosialisasi	35 Peserta	Jumlah peserta sosialisasi	35 Peserta	DPM PTSP	DPM PTSP	30.000.000	320.000	320.000		
2	18	02	2.02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Data untuk Peta Potensi Investasi	1 Dokumen	Jumlah Data untuk Peta Potensi Investasi	1 Dokumen	DPM PTSP	DPM PTSP	50.000.000	160.000	160.000	-	
2	18	02	2.02	02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten / Kota	Jumlah Potensi dan Peluang Usaha yang di Update	27 Kecamatan	Jumlah Potensi dan Peluang Usaha yang di Update	27 Kecamatan	DPM PTSP	DPM PTSP	50.000.000	160.000	160.000		
2	18	03			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Prosentase Peningkatan Investor Penanam Modal	4%	Prosentase Peningkatan Investor Penanam Modal	4%	DPM PTSP	DPM PTSP	295.500.000	150.000.000	150.000.000	-	
2	18	03	2.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Promosi yang dilaksanakan	2 Kegiatan	Jumlah Promosi yang dilaksanakan	2 Kegiatan	DPM PTSP	DPM PTSP	295.500.000	150.000.000	150.000.000	-	
2	18	03	2.01	01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah Dokumen Strategi Penanaman Modal	50 Buku	Jumlah Dokumen Strategi Penanaman Modal	50 Buku	DPM PTSP	DPM PTSP	120.000.000	85.500.000	85.500.000		
							1 Dokumen		1 Dokumen				-	-		
2	18	03	2.01	02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengunjung Calon Investor	135 Pengunjung	Jumlah Pengunjung Calon Investor	135 Pengunjung	DPM PTSP	DPM PTSP	175.500.000	64.500.000	64.500.000		
						Jumlah Pemeliharaan Baliho	30 Pemeliharaan	Jumlah Pemeliharaan Baliho	30 Pemeliharaan				-	-		



## RENJA PERUBAHAN RANCANGAN **ACHIR** DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

2	18	04			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Prosentase Penyelesaian Izin Offline dan Online Tepat Waktu	98,40%	Prosentase Penyelesaian Ijin Offline dan Online Tepat Waktu	98,40%	DPM PTSP	DPM PTSP	550.000.000	670.220.000	670.220.000	-	
2	18	04	2.01		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	2505 Izin	Jumlah Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	2505 Izin	DPM PTSP	DPM PTSP	550.000.000	670.220.000	670.220.000	-	
2	18	04	2.01	01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah izin non perizinan yang diterbitkan	5 Izin	Jumlah izin non perizinan yang diterbitkan	5 Izin	DPM PTSP	DPM PTSP	500.000.000	650.220.000	650.220.000		
						Jumlah izin udaha yang diterbitkan	1500 Izin	Jumlah izin udaha yang diterbitkan	1500 Izin	DPM PTSP	DPM PTSP		-	-		
						Jumlah pelayanan izin pra usaha yang diterbitkan	1000 Izin	Jumlah pelayanan izin pra usaha yang diterbitkan	1000 Izin	DPM PTSP	DPM PTSP		-	-		
2	18	04	2.01	02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi	1000 Pelaku usaha	Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi	1000 Pelaku usaha	DPM PTSP	DPM PTSP	50.000.000	20.000.000	20.000.000		
2	18	05			Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Prosentase Peningkatan Investasi	36%	Prosentase Peningkatan Investasi	36%	DPM PTSP	DPM PTSP	497.462.000	372.462.000	372.462.000	-	
2	18	05	2.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten /Kota	Jumlah Perusahaan yang Berinvestasi	250 Perusaha an	Jumlah Perusahaan yang Berinvestasi	250 Perusaha an	DPM PTSP	DPM PTSP	497.462.000	372.462.000	372.462.000	-	
2	18	05	2.01	01	Koordinasi dan sinkronisasi pemantauan pelaksanaan penanaman modal	Jumlah Perusahaan Yang Terpantau Perkembangannya Melalui Pelaksanaan Penanaman Modal	250 Perusahaa n	Jumlah Perusahaan Yang Terpantau Perkembangannya Melalui Pelaksanaan Penanaman Modal	250 Perusahaa n	DPM PTSP	DPM PTSP	50.000.000	-	-		
2	18	05	2.01	02	Koordinasi dan sinkronisasi Pembinaan pelaksanaan penanaman modal	Jumlah Perusahaan yang Dibina Melalui Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	30 Perusahaa n	Jumlah Perusahaan yang Dibina Melalui Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	30 Perusahaa n	DPM PTSP	DPM PTSP	75.000.000	-	-		
2	18	05	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah PMA/PMDN yang diawasi	100 Unit	Jumlah PMA/PMDN yang diawasi	100 Unit	DPM PTSP	DPM PTSP	372.462.000	372.462.000	372.462.000		
2	18	06			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Prosentase Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	100%	Prosentase Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	100%	DPM PTSP	DPM PTSP	100.000.000	50.000.000	50.000.000	-	



## RENJA PERUBAHAN RANCANGAN **ACHIR** DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

2	18	06	2.01		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perijinan dan Non Perijinan yang Terintegrasi	55 Perijinan dan 7 Non Perijinan	Jumlah Perijinan dan Non Perijinan yang Terintegrasi	55 Perijinan dan 7 Non Perijinan	DPM PTSP	DPM PTSP	100.000.000	50.000.000	50.000.000	-	
2	18	06	2.01	01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data Perijinan dan Non Perijinan yang Dikelola dan Terintegrasi Secara Elektronik	56 Perijinan dan 7 Non Perijinan	Jumlah Data Perijinan dan Non Perijinan yang Dikelola dan Terintegrasi Secara Elektronik	56 Perijinan dan 7 Non Perijinan	DPM PTSP	DPM PTSP	100.000.000	50.000.000	50.000.000		
												7.915.505.000	6.882.945.000	6.118.602.376	-	

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN LAMONGAN

  
**AGUS CAHYONO, SE, M.Si.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196508078 199503 1 002



## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Kerja ( RENJA ) Perubahan menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, Community Base Development (CBD) dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (stakeholders) dalam menciptakan Good Governance sesuai dengan tuntutan paradigma baru.

Output Rencana Kerja Perubahan Dinas Kabupaten Lamongan adalah Program Tahunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan yang sesuai dengan Tupoksi dan sasaran Program Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan

RENJA Perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan selain menjadi pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2021 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan. Sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2021, RENJA Perubahan juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Bappeda Kabupaten Lamongan. RENJA Perubahan juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.

#### **5.1 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan**

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Lamongan Tahun 2021, merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD),



sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian visi, misi daerah.

Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Sekretariat, Bidang-bidang dan seluruh staf Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk :
  - a. Melaksanakan Renja Perubahan Tahun 2021 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
  - b. Menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
2. Dalam rangka efektifitas pelaksanaannya akan dilakukan pengendalian dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Perubahan Tahun 2021.

## **5.2 Rencana Tindak Lanjut**

Dengan ditetapkannya Renja Perubahan Tahun 2021, selanjutnya akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran ( RKA ) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran Sementara ( KUA ) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara ( PPAS ) Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.

Lamongan, November 2021

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN LAMONGAN

**AGUS CAHYONO, SE, M.S.i.**

Pembina Utama Muda





**RENJA PERUBAHAN RANCANGAN **ACHIR** DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PTSP**

NIP. 19650808 199503 1 002